

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *E-PROCUREMENT* PADA PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK DISTRIBUSI (UID) LAMPUNG

Oleh

Nadhila Allia Sadiyya

Pengadaan barang/jasa memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta dalam kelancaran operasional perusahaan, baik di sektor publik maupun swasta. Dalam rangka mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), pemerintah mendorong penerapan *e-government* melalui *e-procurement*. Pada lingkungan BUMN, kebijakan ini diperkuat oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/03/2023 yang menjadi dasar pelaksanaan pengadaan barang/jasa, termasuk di PT PLN (Persero). Namun, implementasi *e-procurement* di PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung terdapat berbagai hambatan seperti gangguan pada sistem, prosedur pengadaan yang tumpang tindih antara digital dan manual, keterbatasan sumber daya manusia, serta ketaatan implementor kebijakan yang belum sepenuhnya maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan *e-procurement*, menganalisis faktor penghambat pelaksanaannya, serta memberikan saran untuk mengatasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun indikator kinerja dan dampak telah tercapai, akan tetapi indikator kepatuhan dan kelancaran rutinitas fungsi belum terpenuhi secara optimal, sehingga menghambat optimalisasi implementasi kebijakan *e-procurement* di PT PLN (Persero) UID Lampung.

Kata kunci: tata kelola perusahaan baik, pengadaan elektronik, BUMN

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE E-PROCUREMENT POLICY IN PT PLN (PERSERO) DISTRIBUTION MAIN UNIT (UID) LAMPUNG

By

Nadhila Allia Sadiyya

The procurement of goods and services plays important role in enhancing the quality of public services as well as supporting operational efficiency in both the public and private sectors. In an effort to realize the principles of Good Corporate Governance (GCG), the government advances the implementation of e-government through e-procurement. Within State-Owned Enterprises (SOEs), this policy is reinforced by the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-02/MBU/03/2023, which serves as the basis for the procurement of goods and services, including at PT PLN (Persero). However, the implementation of e-procurement at PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung faces several obstacles, such as system disruptions, overlapping procurement procedures between digital and manual processes, limited human resources, and suboptimal compliance from policy implementers. This study aims to describe the implementation of the e-procurement policy, analyze the inhibiting factors, and provide recommendations to address them. Using a descriptive qualitative approach and data were collected through interviews, observations, and documentation. The research findings indicate that while performance and impact indicators have been achieved, the indicators of compliance and the smoothness of routine functions have not been fully optimized, thus hindering the optimal implementation of the e-procurement policy at PT PLN (Persero) UID Lampung.

Keywords: good corporate governance, e-procurement, SOEs